

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan irigasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sistem irigasi perlu dikelola dengan baik, dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat. Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan UU No. 17 tahun 2019, pemerintah telah menetapkan kebijakan di bidang irigasi dengan menerbitkan serangkaian Peraturan Menteri (Permen). Sementara itu untuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang terkait irigasi sedang dalam proses penyusunan.

Sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Permen PUPR No. 30 tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, yang disingkat "PPSI". Selanjutnya dalam rangka penerapan PPSI, terutama di tingkat kabupaten/kota, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian telah merumuskan suatu konsep perencanaan terpadu berjudul Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, yang disingkat "RP2I".

Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi, dengan pengalaman dari WISMP dan kegiatan lainnya. Dari pengalaman tersebut ditemukan beberapa kenyataan kondisi petani penggarap di Indonesia: (i) Kelembagaan petani, air dan irigasi lemah; (ii) Sistem irigasi kurang dan buruk pemeliharannya (Mimin Aminah & Budhi G.S, 2009; Tri Bastuti Purwantini & Rita

Nur Suhaeti, 2017); (iii) Kurang tenaga dan lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) Infrastruktur kurang dan buruk pemeliharanya; (v) Akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa terbatas (Supriyati & Erma Suryani, 2006); (vi) Kepemilikan lahan tidak jelas; (vii) Kesenjangan teknologi, dan (viii) Potensi komoditas bernilai tinggi terabaikan (Eko Aristanto, 2007). Terdapat potensi manfaat signifikan yang dapat direalisasikan dari IPDMIP khususnya sepanjang berkaitan dengan masalah khusus tersebut.

Dalam pencapaian tujuan IPDMIP, maka didukung oleh Konsultan Pendukung IPDMIP. Konsultan Pendukung IPDMIP bertugas mendukung dan memfasilitasi pencapaian Disbursement Linked Indicators (DLI) yang telah disepakati oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan Program IPDMIP tersebut mendukung upaya yang dilakukan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanian yang dihadapi antara lain (i) kerusakan pada saluran irigasi sekunder dan tersier; (ii) pemeliharaan prasarana sistem irigasi yang kurang; (iii) lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi (iv) potensi komoditas bernilai tinggi yang terabaikan (Aristanto, Eko, 2020).

Dalam upaya mendukung tercapainya swasembada beras sesuai dengan program Nawacipta, Indonesia sebagai sebuah negara agraris telah menciptakan berbagai program di bidang irigasi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air. Kebijakan tersebut antara lain melalui peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, termasuk jaringan irigasi, pengembangan dan pengelolaan irigasi. Hingga saat ini Daerah Irigasi yang dikelola pemerintah masih merupakan salah satu lumbung pangan yang memberikan sumbangan besar bagi produksi pangan nasional. IPDMIP merupakan sebuah program 5 tahunan (2017-2021) yang diharapkan secara penuh dapat merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Kerusakan Daerah Irigasi akibat menurunnya kemampuan jaringan irigasi, Dana operasi dan pemeliharaan optimal yang masih rendah, produksi pertanian turun dan kelembagaan pengelolaan pertanian yang belum

optimal merupakan beberapa hal yang melatarbelakangi terciptanya program IPDMIP (BAPPEDA SUMBAR, 2016). Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan petani sebagai pemakai air irigasi dalam melaksanakan produksi pangan, maka fungsi kelembagaan petani pemakai air sangat berperan dominan.

Pengelolaan irigasi pertanian partisipatif merupakan salah satu strategi dalam penguatan kemampuan kelembagaan irigasi, petani pemakai air, dan penerima manfaat irigasi lainnya. Mengingat keberagaman pihak terkait irigasi, diperlukan perencanaan yang tepat, terpadu dan terintegrasi dalam program penguatan dan pengembangan tersebut.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan yang tepat, terpadu, dan terintegrasi berbasis peran serta masyarakat adalah Profil Sosial, Ekonomi, Teknis, dan Kelembagaan (PSETK). Secara konseptual, PSETK dapat didefinisikan sebagai gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu DI yang membantu Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) dalam perencanaan program pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A untuk meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif. Dokumen PSETK disusun untuk setiap DI kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota Penerima IPDMIP.

Tabel 1.1 Rencana kerja IPDMIP Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Nama DI	Kecamatan	Luas Total sesuai Permen PUPR (Ha)
1	Titi Ampera	Akabiluru	807
2	Tanjung Bataut	Guguak	235
3	Batang Sanipan	Harau	628
4	Batang Mungo	Harau	987
5	Batang Coran	Lareh Sago Halaban	223
6	Lurah Bukit	Lareh Sago Halaban	223

No.	Nama DI	Kecamatan	Luas Total sesuai Permen PUPR (Ha)
7	Bdr. Baliak Sariak	Lareh Sago halaban	350
8	Batang Liki	Suliki	220

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019.

Tabel 1.2 Lokasi DI Batang Mungo

No.	Jorong	Nagari	Luas Area (Ha)
1	Tanjung Ateh	Taram	297
2	Parak Baru	Taram	152
3	Tanjung Kubang	Taram	101
4	Sipotai	Taram	122
5	Gantiang	Taram	160
6	Balai Cubadak	Taram	155
Total			987

Sumber: Dokumen PSETK DI Batang Mungo, 2020.

Daerah Irigasi (DI) Batang Mungo adalah DI yang melintasi 1 nagari, yaitu Nagari Taram. Dimana Nagari Taram ini terdiri dari 7 jorong, akan tetapi yang dilintasi oleh air DI Batang mungo hanya 6 jorong.

Daerah Irigasi Batang Mungo memiliki 1 GP3A yang terdiri dari 6 P3A yang tersebar di enam jorong. Kinerja yang kurang baik atau hanya sekedar cukup untuk memperlihatkan bahwa kelembagaannya sudah terbentuk tapi masih belum mampu berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pertanian. Dampak nyata terlihat pada penurunan kinerja sistem irigasi Batang Mungo.

Secara fisik saluran dan bangunan distribusi yang ada di DI Batang Mungo umumnya mengalami kerusakan namun masih dapat berfungsi. Kategori kerusakan yang ada adalah rusak sedang, artinya secara struktur saluran tersebut rusak namun tetap dapat berfungsi sebagai sarana untuk membawa air irigasi kepetak sawah milik petani. Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi di DI Batang Mungo juga masih lemah. Distribusi air hulu-hilir masih belum merata, hubungan

komunikasi antara pengelola dan pengurus, petani hulu dengan hilir juga masih belum terkoordinasi dengan baik. Dilihat dari keadaan eksisting saluran dan bangunan distribusi, sedimentasi yang tinggi dan sampah yang menumpuk menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat petani untuk bergotong royong membersihkan saluran irigasi, karena kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan petugas pengairan yang disediakan pemerintah.

Tabel 1.3 Lokasi DI Lurah Bukik

No.	Jorong	Nagari	Luas Area (Ha)
1	Tareh	Balai Panjang	50
2	Lurah Bukik	Balai Panjang	123
3	Tampuang Godok	Balai Panjang	50
Total			223

Sumber: Dokumen PSETK DI Lurah Bukik, 2020.

Sumber utama air untuk DI Lurah Bukik adalah sungai Batang Mangkisi. Ketersediaan air memang jadi masalah untuk DI Lurah Bukik, karena jika musim kemarau debit air sangat terbatas atau berkurang. Sehingga air yang masuk ke saluran irigasi mengalami penurunan debit yang cukup signifikan. Kondisi ini jika berlangsung dalam waktu yang relatif lama, pada saatnya akan berdampak kekurangan air bagi persawahan yang ada di hilir bendung.

Tingginya kehilangan air terutama disebabkan kondisi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan parah, seperti adanya kebocoran pada lantai dan dinding pasangan serta pengambilan air secara liar oleh petani dengan cara melobangi saluran sesuai dengan kebutuhan mereka dan menggunakan pompa air tanpa seizin petugas. Kerusakan parah pada jaringan karena usia bangunan tersebut yang sudah lama dan juga akibat derasnya aliran air. Selain itu juga ditemukan adanya pasangan saluran yang rendah/turun serta adanya saluran yang tersumbat sehingga air mengalir keluar saluran irigasi. Hal inilah yang menyebabkan aliran irigasi tidak sampai ke wilayah tengah dan hilir. Penggunaan air oleh masyarakat petani adalah

untuk pemenuhan kebutuhan pertanian khususnya untuk tanaman padi, jagung, timun, dan palawija lainnya yang dibudidayakan bersamaan dengan musim tanam.

Tabel 1.4 Lokasi DI Bdr Baliak Sariak

No.	Jorong	Nagari	Luas Area (Ha)
1	Padang Aur	Ampalu	124
2	Padang Mangunai	Ampalu	105
3	Guguak	Ampalu	121
Total			350

Sumber: Dokumen PSETK DI Bdr Baliak Sariak, 2020.

Sumber utama air DI Bdr Baliak Sariak ini adalah aliran sungai Batang Sinamar yang mengalir ke Nagari Ampalu. Pada awalnya Bendungan irigasi dibuat secara sederhana dengan mempergunakan pohon-pohon kayu dan batang pisang. Pada masa Pemerintahan Orde Baru dibangunlah bendungan dengan konstruksi beton. Sehingga air yang bisa dialirkan bisa lebih ditingkatkan kapasitasnya dan bisa diatur volumenya. Bahkan bendungan yang awalnya hanya satu saluran sekunder berkembang menjadi dua buah saluran sekunder. Secara umum, DI Bdr Baliak Sariak dimanfaatkan untuk keperluan pertanian masyarakat, seperti padi, palawija dan usaha perikanan. Namun tetap didominasi oleh usaha tani padi sawah. Penggunaan air oleh masyarakat petani adalah untuk pemenuhan kebutuhan pertanian khususnya untuk tanaman padi, jagung, timun, dan palawija lainnya yang dibudidayakan bersamaan dengan musim tanam. Selain itu pengendalian di bangunan bagi dan bangunan sadap tidak dapat dilakukan secara maksimal karena bangunan tersebut fungsinya telah mengalami penurunan. Ketersediaan air baik di hulu, tengah dan hilir daerah irigasi tidak seimbang karena sedimentasi dan penumpukan sampah pada saluran sehingga distribusi air tidak lancar dan kurang maksimal. Kualitas air dipengaruhi oleh kualitas lingkungan daerah irigasi, apabila kualitas lingkungan daerah irigasi tersebut baik maka kualitas airnya akan baik. Kualitas air di DI Bdr Baliak Sariak saat ini masih tergolong baik.

Penyusunan PSETK dimaksudkan untuk menyediakan data atau informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang dibutuhkan di DI yang bersangkutan dalam program pemberdayaan kelembagaan petani DI melalui P3A/GP3A/IP3A bersama Poktan/Gapoktan menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi pertanian partisipatif dan berwawasan lingkungan. Adapun lingkup Penyusunan PSETK mencakup beberapa aspek pokok, yaitu:

- a. Aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan meliputi: mata pencaharian, status petani, luas garapan, kegiatan usaha tani, kelembagaan tradisional yang ada, cara pengelolaan irigasi, potensi sumber daya lokal, peluang usaha dan lain-lain. Data-data tersebut sebagai masukan dalam program pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif;
- b. Aspek teknis irigasi meliputi: sumber air, ketersediaan dan kualitas air, potensi lahan, pengelolaan jaringan, sistem alokasi air, kondisi fisik dan tingkat kefungsi jaringan irigasi, pola tanam dan produksi hasil usaha tani, kebutuhan perbaikan dan lain-lain. Data-data tersebut sebagai masukan dalam program peningkatan kinerja jaringan irigasi dan pengelolaan irigasi partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi petani;
- c. Aspek penelusuran kebutuhan petani dan permasalahan yang ada, cara pemecahan dengan menggunakan potensi sumber daya lokal diperlukan peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang didasarkan atas usulan/kebutuhan petani/P3A sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Pembangunan pertanian khususnya pada tanaman pangan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani, meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan dan swasembada pangan. Untuk mencapai Tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ikut andil dalam program IPDMIP dengan harapan meningkatkan pengetahuan petani khususnya di bidang irigasi agar masyarakat tani mampu mengelola sistem irigasi dengan baik agar tidak terjadi gagal panen pada saat datang musim kemarau dan kesejahteraan petani terus meningkat, dengan ikut andilnya

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam program IPDMIP menjawab keraguan masyarakat tentang keseriusan pemerintah daerah dalam membangun pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan padi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berharap dengan di ikut sertakannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam program IPDMIP masyarakat tani bisa belajar dengan serius guna menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh penyuluh bisa langsung di aplikasikan pada kehidupan sehari-hari dalam bertani.

Tabel 1.5 Perkembangan produksi padi di Kab.Lima Puluh Kota periode 2017-2020

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	2017	60.267	260.116,30	4,32
2	2018	60.262	260.084,20	4,32
3	2019	60.248	236.162,70	3,92
4	2020	60.197	209.861,40	3,49

Sumber. Dinas Pertanian Kab. Lima Puluh Kota, 2020

Berdasarkan tabel 1.5 diatas dapat di lihat dari tahun ketahun luas panen terus mengalami perubahan dimana perubahan penurunan luas panen paling signifikan terjadi antara tahun 2019-2020. Luas panen pada tahun 2019 (60.248 Ha) dan pada tahun 2020 menjadi (60.197 Ha) terjadinya penurunan tersebut tentunya mempengaruhi produksi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penurunan luas panen di sebabkan oleh banyak faktor di antaranya dijadikan lahan permukiman dan kekeringan akibat kerusakan embung atau dalam penampung air yang biasa digunakan masyarakat.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan program IPDMIP di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap pendapatan petani.

2. Untuk mengetahui peningkatan partisipatif petani dalam pengelolaan jaringan irigasi
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan / kesulitan dalam menjalankan program IPDMIP dalam peningkatan partisipatif masyarakat petani.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai suatu informasi atau masukan yang dapat menjadi rujukan bagi semua pihak dalam penerapan program IPDMIP 100% agar tercapai dengan baik, serta untuk mengetahui bagaimana mengatasi kesulitan atau hambatan dalam penerapan program IPDMIP, dan mengetahui korelasi antara tingkat kesulitan dan tingkat penerapan program IPDMIP tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada penerapan program IPDMIP dalam peningkatan partisipatif petani terhadap pengelolaan jaringan irigasi
2. Penelitian ini berfokus pada pengaruh dari penerapan program IPDMIP terhadap pendapatan petani di Daerah Irigasi Batang Mungo, Daerah Irigasi Lurah Bukik dan Daerah Irigasi Bdr. Baliak Sariak.

Penelitian ini berfokus pada hambatan / kesulitan dalam menjalankan program IPDMIP terhadap peningkatan partisipatif masyarakat petani di Daerah Irigasi tersebut.

